



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA WISATA DI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

THE ROLE OF THE VILLAGES' CONSULTATIVE BODIES IN SUPERVISING GOVERNANCE AT THE TOURISM VILLAGE OF LABUHAN HAJI DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY

Lalu Agung Karta Panji

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: laluagungkartapanji@unram.ac.id

Rr. Cahyowati

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: cahyowati@unram.ac.id

H. Rusnan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rusnan74@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengetahui Peran BPD dalam melakukan Pengawasan di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji. Metode penyusunan yang penyusun gunakan yaitu metode penyusunan hukum empiris. Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa, Peran BPD di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa kendala dan rencana pembangunan wisata yang belum bisa disetujui oleh Masyarakat. Dampak yang terjadi antara lain belum terealisasinya pembangunan wisata tersebut sehingga BPD harus mengevaluasi ulang rencana tersebut. Solusinya BPD sebaiknya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana membahas tujuan dibentuknya wisata yang direncanakan tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dibentuknya wisata yang belum terealisasi tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Desa Wisata

ABSTRACT

The study aims to determine the role of the Village's Consultative Bodies (BPD) in supervising the Tourism Village in Labuhan Haji District. The method used is empirical legal study. The results showed that the role of BPD in the Tourism Village in Labuhan Haji District has been going well enough. However, there were still some obstacles and tourism development plans that could not be approved by the community. The impacts that occur include the unrealisation of the tourism development, which requires BPD to re-evaluate the plan. The solution is that BPD should immediately socialize to the community, which discusses the purpose of the establishment of the planned tourism. Thus, the community and the village government have the same understanding regarding the purpose of those unrealized tourism plans.

Keywords: BPD, Supervision, Village Tourism.

A. PENDAHULUAN

Potensi alam yang dimiliki Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat juga mengusung tema wisata pedesaan yang telah menjadi salah satu destinasi yang banyak diminati dan didatangi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dengan menawarkan gaya hidup masyarakat yang lebih alami dengan menunjukkan keaslian budaya daerah. Berbagai daerah mulai mengembangkan desa wisata sebagai alternatif tujuan wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, termasuk Kabupaten Lombok Timur.¹

Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat². Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Sehubungan dengan pengembangan pariwisata, BPD bersama dengan Kepala Desa membahas manajemen aset yang dimiliki oleh masing-masing desa, dalam hal ini aset desa berupa keindahan alam yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata³

Pantai Labuhan Haji merupakan destinasi wisata yang strategis di Lombok Timur. Permasalahan utama di pantai ini adalah sampah yang masih sering dijumpai di sekitar pantai. Minimnya pemahaman masyarakat Desa Labuhan Haji mengenai sadar wisata. Potensi Labuhan Haji sebagai destinasi wisata pantai di Lombok Timur belum dikembangkan secara maksimal oleh pihak pengelola. Potensi wisata Pantai Labuhan Haji masih tersembunyi dan cenderung diabaikan oleh pihak pengelola. Minimnya Sumber Daya Manusia yang ahli di bidang pengembangan wisata pantai merupakan salah satu permasalahan yang ada sehingga diperlukan strategi untuk memecahkan masalah tersebut.

Pengawasan terhadap desa wisata yang dilakukan BPD bersama dengan perangkat desa lainnya harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mewujudkan tujuan bersama, dengan cara BPD mengawasi secara langsung turun ke lapangan untuk mengawasi masyarakat dan pengelola wisata agar tidak terjadi penyimpangan di Desa Wisata. Untuk itu, penulis mengambil judul Peran BPD Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata (Studi Di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur) untuk mengetahui pelaksanaan peran BPD dalam pengawasan di desa wisata khususnya di Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana peran BPD dalam pengawasan pemerintahan di desa wisata? 2). Apa kendala yang di hadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan pemerintahan di desa wisata dan solusinya?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui peran BPD dalam melakukan pengawasan pemerintahan di desa wisata 2). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan pengawasan pemerintahan di desa wisata

1 Larasati, dkk, 'Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Usaha Pondok Wisata Di Desa Wisata Tetebatu Kabupaten Lombok Timur', Universitas Udayana, Denpasar, Bali, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, (2021)

2 Firma Firman, 'Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa', *Jurnal Hukum Institut Lamadukkeleng Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan*, (2020), hlm 39–52.

3 Dian Novita Putri Pradhana, *Strategi Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019), hlm 1-9

dan solusinya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat teoritis penelitian ini, memberikan kegunaan untuk meneliti dan mengembangkan ilmu hukum yang terkait khususnya mengenai tentang peran BPD dalam melakukan pengawasan pemerintahan di desa wisata. 2). Manfaat praktis dari penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan kepada para pihak yang berkepentingan yang khusus terkait dengan peran BPD dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan di desa wisata. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum empiris.⁴ 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),⁵ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁶ dan Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*). 3). Jenis Data, a) Data Primer b) Data Sekunder. Sedangkan sumber Data yaitu a) Data Lapangan, b) data Kepustakaan Teknik pengumpulan data yaitu 1) Data Observasi, 2) 2. Interview atau wawancara 3).Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data berupa data primer dan sekunder dengan sumber bahan hukum dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui interview narasumber dan observasi, pengumpulan bahan dengan teknik studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan Haji

1. Sejarah

Berdasarkan sejarah, daerah ini dinamakan Labuhan Haji dikarenakan pada era pendudukan Belanda dan Jepang, masyarakat Lombok memanfaatkan Pelabuhan ini sebagai tempat awal berangkat menunaikan ibadah Haji ke Mekkah, Arab Saudi. Transportasi laut pada masa itu belum secanggih transportasi pada masa sekarang sehingga lebih banyak menggunakan alat transportasi seadanya seperti kapal layar. Disamping penggunaannya sebagai Pelabuhan untuk pergi berhaji, tempat ini juga berfungsi sebagai pintu masuk para pedagang keturunan Cina ke wilayah Lombok. etnis China.

2. Geografi

Labuhan Haji terletak pada 08° 40' LS dan 116° 34' BT, dengan jarak sekitar 7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur di Selong. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kecamatan Selong, Lombok Timur

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 34.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 164.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 177.

Sebelah Utara : Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur
 Sebelah Selatan : Kecamatan Keruak, Lombok Timur
 Sebelah Timur : Selat Alas.⁷

3. Demografi

Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, Kecamatan Labuhan Haji memiliki jumlah penduduk 65.588 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 32.287 dan perempuan 33.301, dengan kepadatan sedang antara 1000 sampai dengan 2000 jiwa per kilometer persegi. Mata pencaharian penduduk daerah ini sebagian besar mengandalkan hidup dari menangkap ikan.

4. Pemerintahan

Kecamatan Labuhan Haji terbagi menjadi tiga kelurahan, empat desa, dan 53 lingkungan atau dusun.

5. Angkutan

a. Dermaga Labuhan Haji

Dermaga Labuhan Haji didirikan pada masa Pemerintahan Bupati Ali Bin Dahlan yang menelanbiayaratusanMilyar.Namun,hinggasaatinipengerjaannyabelumrampungdanbelum difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar memanfaatkan areal dermaga sebagai tempat mencari ikan dengan sampan dilengkapi baling-baling bermotor.

a. Lapangan terbang Rambang

Lapangan terbang Rambang merupakan lapangan terbang pertama di Lombok. Letaknya di sebelah selatan Labuhan Haji yang mana sampai saat ini Rambang masih ada dan dikelola oleh TNI Angkatan Laut. Rambang sempat menjadi lapangan terbang transit Jean Batten, wanita pertama yang terbang solo dari Inggris ke Australia dalam rangka MacRobertson Air Race tahun 1934.

b. Gambaran Umum Wisata Kecamatan Labuhan Haji

1. Desa Labuhan Haji

Desa Labuhan Haji Labuhan Haji terletak pada 08° 40' LS dan 116° 34' BT, dengan jarak sekitar 7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur di Selong.⁸ Pantai Labuhan Haji sesudah dicanangkan menjadi tempat wisata oleh pemerintah pada tahun 2012 menjadi pusat perhatian oleh masyarakat untuk dikunjungi. Lokasi Pantai Labuhan Haji sangat strategis dari pusat kota karena untuk menuju ke Pantai Labuhan Haji dari pusat kota hanya 10 menit.

2. Desa Peneda Gandor

Peneda Gandor merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Tipologi wilayah Desa Peneda Gandor merupakan Desa dengan luas wilayah 450 Ha yang terdiri dari Tanah Pemukiman 178.75 Ha Tanah Sawah Irigasi Setengah Tehnis 243,25 Ha Tanah Sawah Tadah Hujan 5.00 Ha Jalan Sungai dan Kuburan 23.00 Ha Jarak ke Ibu kota Propinsi ± 60 km, sedangkan jarak ke Ibukota

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Labuhan_Haji,_Lombok_Timur, Sejarah Kecamatan Labuhan Haji, di unggah pada tanggal 15 juli 2023

⁸ http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Labuhan-Haji_62719_kk-sttbandung.html#-Geograf, letak geografi desa labuhan haji, diunggah pada tanggal 15 juli 2023

Kabupaten ± 7 Km dan merupakan desa yang berada di wilayah kecamatan Labuhan Haji dengan jarak ke Kantor Kecamatan ± 2 Km.⁹

3. Desa Banjar Sari

Desa Banjar Sari merupakan desa yang berada di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang mana secara administratif wilayah desa Banjar Sari memiliki luas wilayah 246.335 Ha.¹⁰ Pengembangan sektor wisata dipandang sebagai suatu yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu khususnya wilayah Desa Banjar Sari yang memiliki potensi objek wisata. Wisata Kolam Renang Taman Sari yang merupakan salah satu wisata yang berada di Kecamatan Labuhan Haji tepatnya di Desa Banjar Sari yang mana pembangunannya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ini dinilai memiliki potensi yang cukup tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan harapannya dapat meningkatkan potensi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha kecil dan menengah masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat sekitar.

c. Peran BPD Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata

Badan Permusyawaratan Desa atau di singkat BPD merupakan salah satu komponen pemerintahan yang berperan aktif dalam suksesnya desa wisata. Pelaksanaan desa wisata di Kabupaten Lombok Timur khususnya Desa Labuhan Haji, Desa Banjar Sari, dan Desa Peneda Gandor juga harus memperhatikan peran dari BPD baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pelaksanaan studi lapangan, hasil dari penelitian ini memperoleh beberapa data sebagai berikut:

1. Desa Wisata Labuhan Haji

Hasil dari Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya adalah telah secara maksimal menjalankan tugasnya sebagai pengawas yaitu telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin yaitu satu kali dalam satu bulan, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam upaya mengembangkan potensi wisata alam yang ada di Desa Labuhan Haji, selain itu BPD juga ikut serta mengontrol pemasukan/retribusi yang masuk yaitu yang berasal dari pendapatan asli desa yang dikelola oleh bendahara desa, serta peran Pemerintah Desa Labuhan Haji dan BPD dalam tatakelola pariwisata yang baik sebagai kemitraan kepemilikan lokal sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan dengan Ketua BPD Desa Labuhan Haji bapak L. Supratman dan Warga Desa Labuhan Haji ibu atun menunjukkan bahwa BPD berdiri sejak tahun 2014, pada awal berdirinya Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan sosialisasi ke masyarakat dengan cara mengundang Kepala Dusun setempat serta beberapa tokoh masyarakat untuk menghadiri sosialisasi di Kantor Desa dalam rangka telah dibentuknya BPD. Untuk kegiatan lapangan sebagai pengawas BPD di Desa Labuhan Haji sudah melakukan tugasnya dengan baik dan telah dilaksanakan dengan rutin serta memfokuskan pengawasan kepada pengelola wisata dan juga kepada warga setempat dan kepada wisatawan. Berdasarkan hasil wawancara

⁹ <https://www.penedagandor.desa.id/artikel/2019/4/17/selayang-pandang-desa-penedagandor, gambaran umum wisata desa peneda gandor, diunggah pada tanggal 15 juli 2023>

¹⁰ <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/10/7/profil-wilayah-desa, gambaran umum desa banjar sari, diunggah pada tanggal 15 juli 2023>

dengan warga Desa Labuhan Haji ibu atun menggambarkan kondisi lokasi wisata yang kotor dan sampah berserakan dimana ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kebersihan lingkungan kurang dari masyarakat dan juga pengunjung.

2. Desa Wisata Peneda Gandor

Hasil dari bentuk pengawasan BPD di Desa Peneda Gandor ini bisa dilihat dari beberapa rencana Pembangunan yang telah dilaksanakan dan telah terealisasi oleh pemerintah desa serta bekerja sama dengan dinas pariwisata sudah berjalan dengan baik, BPD juga ikut serta mengontrol pemasukan atau retribusi asli desa sehingga keuangan desa menjadi baik, dan juga BPD selalu mendengar aspirasi dari masyarakat, hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa dan BPD telah membentuk atau membuat lokalisasi untuk berdagang dan adanya bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan kolam pemancingan ikan ini dengan cara berdagang makanan serta pelayanannya sehingga masyarakat dapat menerima langsung keuntungan ekonomi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan dengan Ketua BPD Desa Peneda Gandor Bapak Rusuluddin dan Warga Desa Peneda Gandor ibu Nursasih menunjukan bahwa BPD berdiri sejak tahun 2009, pada awal berdirinya, Ketua BPD mengadakan sosialisasi ke masyarakat, dan juga hadir di hajatan warga setempat guna memperkenalkan BPD itu sendiri. Dalam kegiatan lapangan sebagai pengawas, BPD di Desa Peneda Gandor sudah melakukan tugasnya dengan baik dan telah dilaksanakan dengan rutin hampir setiap hari serta memfokuskan pengawasan kepada pengelola wisata dan juga kepada warga setempat. Sampai saat ini, BPD di Desa Wisata Peneda Gandor sudah beberapa kali membentuk peraturan untuk pengembangan desa yaitu Perdes Bumdes dan aturan terkait dengan retribusi.

3. Desa Banjar Sari

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan dengan Ketua BPD Desa Banjar Sari Bapak Nasruddin dan Warga Desa Banjar Sari Ibu Suci BPD di Banjar Sari mulai terbentuk pada tahun 2009. Pada saat awal pembentukannya, pemerintah desa menyelenggarakan sosialisasi dengan cara mengundang masyarakat ke kantor desa dengan tujuan memperkenalkan BPD ke masyarakat umum. Sebagai upaya untuk pelaksanaan pengawasan, BPD melakukan kegiatan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat secara langsung. Artinya, BPD terjun langsung ke masyarakat untuk setiap aturan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada saat realisasi tugasnya sebagai pengawas, BPD berfokus melakukan pengawasan dan koordinasi yang mana ditujukan kepada masyarakat dan pengelola wisata. BPD yang melaksanakan setiap kegiatannya yang mengikut sertakan masyarakat, secara langsung mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan baik kepada masyarakat maupun kepada pengelola itu sendiri.

d. 1. Kendala Yang Di Hadapi Oleh BPD Dalam Melakukan Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Dan Solusi

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan bersama Ketua BPD dan Anggota BPD di Desa Labuhan Haji, Peneda Gandor, Banjar Sari dilapangan menunjukan bahwa kendala yang dialami oleh BPD dalam pengawasan di Desa Wisata Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur khususnya di Desa Labuhan Haji, Peneda Gandor, dan Banjar Sari yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Wisata di Desa Wisata Labuhan Haji sehingga lokasi Wisata menjadi kotor.
2. Adanya penolakan dari masyarakat atas dibangunnya kolam pemancingan yang ada di Desa Peneda Gandor.
3. Kendala yang dihadapi BPD ialah kekurangan air bersih di Daerah Desa Wisata Kolam Pemancingan pada musim kemarau yang disebabkan oleh DAMAIR PENEDA yang belum aktif secara maksimal sehingga tempat wisata tidak dapat beroperasi secara maksimal.
4. Pengunjung Kolam Taman Sari mulai menurun dikarenakan pengunjung lebih memilih Wisata Kolam lain hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keadaan Kolam Taman Sari hanya di peruntukkan untuk anak kecil saja dan fasilitas yang ada tidak memadai seperti tempat ibadah dan kamar mandi pengunjung yang tidak terawat.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun bersama Ketua BPD di Desa Labuhan Haji, Peneda Gandor, Banjar Sari di lapangan.

2. Solusi yang dapat diberikan oleh BDP dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu :

- a. BPD Desa Labuhan Haji sudah melakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan wisata dan mengajak masyarakat gotong royong untuk membersihkan lokasi Wisata setiap satu kali satu minggu di Desa Wisata Labuhan Haji.
BPD Desa Peneda Gandor sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan akan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam menjalankan wisata kolam pemancingan yang ada di Desa Peneda Gandor.
- b. BPD di Desa Banjar Sari mengajukan kepada BWS (Balai Wilayah Sungai) Provinsi terhadap DAMAIR PENEDA untuk dipermanenkan menjadi bendungan guna dapat mengontrol aliran air pada musim kemarau.
- c. BPD di Desa Banjar Sari mengusulkan kepada Kepala Desa dan BUMDES terhadap adanya renovasi dan pengembangan Wisata Kolam Pemandaian Taman Sari agar dapat memikat pengunjung berkunjung ke Taman Kolam Sari.

D. KESIMPULAN

Peran BPD dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Wisata Kecamatan Labuhan Haji sudah berjalan seperti yang diharapkan, dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan wisata yang ditujukan kepada pengelola wisata dan juga masyarakat, namun upaya ini belum optimal karena masih ada kendala. Kendala yang di hadapi oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan di Desa Wisata adalah di Desa Labuhan Haji kesadaran masyarakat dan pengunjung tentang kebersihan lingkungan wisata masih kurang, di Desa Peneda Gandor adanya penolakan masyarakat atas kolam pemancingan karena tidak melibatkan masyarakat dan sumber air kolam pemancingan berasal dari DAM AIR PENEDA, jika musim kemarau mengakibatkan debit air berkurang, di Desa Banjar Sari yaitu kurangnya pengunjung pada Kolam Taman Sari karena tidak adanya kolam pemandian untuk orang dewasa, solusi yang di tawarkan adalah BPD di Desa Labuhan Haji melakukan sosialisasi terkait kebersihan lingkungan wisata dan mengajak masyarakat gotong royong untuk membersihkan lokasi wisata, BPD di Desa Peneda Gandor harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kolam pemancingan, dan pihak desa

mengajukan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) agar DAM AIR PENEDA dipermanenkan, di Desa Banjar Sari, BPD mengusulkan agar dibangun kolam pemandian untuk orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 164.

Dian Novita Putri Pradhana, *Strategi Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019), hlm 1-90

Firma Firman, 'Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa', *Jurnal Hukum Institut Lamaddukkeleng Sengkang*, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, (2020), hlm 39-52

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017/

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

3. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Labuhan_Haji,_Lombok_Timur, Sejarah Kecamatan Labuhan Haji, di unggah pada tanggal 18 juli 2023

http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Labuhan-Haji_62719_kk-sttbandung.html#Geograf, letak geografi desa labuhan haji, diunggah pada tanggal 18 juli 2023

<https://www.penedagandor.desa.id/artikel/2019/4/17/selayang-pandang-desa-penedagandor>, gambaran umum wisata desa peneda gandor, diunggah pada tanggal 15 juli 2023

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/10/7/profil-wilayah-desa>, gambaran umum desa banjar sari, diunggah pada tanggal 15 juli 2023.